

Teori Struktur Pasar dan Perilaku Perusahaan: Bedah Kasus pada Struktur Pasar Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Petani

Nurhayat Indra

Pendahuluan

Indonesia saat ini merupakan negara nomor 1 di dunia dalam memproduksi kelapa sawit yang sangat penting dalam menyediakan bahan pangan minyak nabati yang paling efisien, sumber energi hijau terbarukan, serta aneka produk industry turunannya untuk berbagai utilitas yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Menurut data Indexmundi 2019 dalam Rino Afrino, 2023. Total produksi sawit Indonesia mencapai 42,5 juta metrik ton, sudah jauh meninggalkan pesaingnya, yaitu Malaysia 19,8 juta ton, dan Thailand 3 juta ton.

Untuk menjadikan Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia melalui perjalanan yang panjang, dimulai dari kebijakan nasionalisasi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda pada periode 1957 hingga 1959 (cikal bakal berdirinya PT. Perkebunan Nusantara di wilayah Sumatera). Setelah Indonesia Merdeka, pembangunan ekonomi perkebunan kelapa sawit secara ekstensif dan intensif dimulai pada tahun 1980 melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Transmigrasi dan kredit Pengembangan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN), perkebunan kelapa sawit berkembang sangat pesat.

Menurut data statistic perkebunan Indonesia tahun 2022, dalam kurun waktu 42 tahun dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2022, luas areal perkebunan sawit Indonesia telah mengalami peningkatan 52 kali lipat atau 5.221 %, dari 294.560 hektar menjadi 15,4 juta hektar. Begitu pun produksinya meningkat sekitar 68 kali lipat atau 6688 % dari 721.172ton menjadi 48,3 juta ton. Ditinjau dari kondisi tanaman, Tanaman Belum Menghasilkan 2,2 juta hektar (14,8%), Tanaman Menghasilkan 11,9 juta hektar (82,21%), Tanaman Rusak 0,43 juta hektar (2,98%). Pengusahaan terbesar perkebunan kelapa sawit dikuasai oleh Perkebunan Besar Swasta (61,07%), Perkebunan Rakyat (41,44%), dan sisanya oleh Perkebunan Besar Nasional (5,05%). Kondisi ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap struktur pasar TBS, CPO, PKO dan produk turunannya baik di tingkat nasional maupun global.

Chapter ini pembahasannya difokuskan pada teori struktur pasar dan perilaku perusahaan kelapa sawit meliputi petani sebagai produsen (sisi penawaran) Tandan Buah Segar (TBS), perusahaan besar (Swasta dan Negara) yang bertindak sebagai produsen TBS dan juga konsumen (sisi permintaan) TBS untuk dijadikan bahan baku ekstraksi CPO (*Crude Palm Oil*) dan *Palm Kernel Oil* (PKO) yang selanjutnya menjadi mata dagangan ekspor penting dan industry turunannya dari CPO yang bernilai ekonomi tinggi. Penggunaan teori ini diharapkan dapat menjelaskan terjadinya disparitas harga TBS di tingkat petani yang menyebabkan adanya ketidakadilan harga atau eksploitasi petani oleh perusahaan besar.

Teori Struktur Pasar dan Perilaku Perusahaan

Struktur pasar, secara teori dikembangkan oleh para ekonom klasik dan neo klasik, yang kemudian dalam sejarah perkembangan teori ekonomi dikenal dengan mazhab ekonomi klasik dan ekonomi neo klasik. Oleh karena itu, sebelum lebih dalam menjelaskan teori struktur pasar, terlebih dahulu akan disinggung secara singkat mengenai falsafah dasar dari ke dua mazhab ekonomi tersebut. Teori klasik dipelopori oleh Adam Smith dan para pengikutnya, sedangkan mazhab ekonomi neo klasik para pelopornya diantaranya adalah Gossen, Walras, Marshall (Disman, 2014).

Teori ekonomi klasik, menganut asas politik ekonomi “*laissez faire*”. Pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Teori harga merupakan perhatian sentral dari mazhab klasik. Masyarakat melalui mekanisme pasar akan secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment yang akan membimbing perekonomian menggunakan sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Sedangkan mazhab ekonomi neo klasik, tokoh sentralnya adalah Alfred Marshall. Sumbangan pemikiran Marshall yang terkenal dalam teori nilai (harga) barang dan jasa merupakan sintesis antara pemikiran pemula mazhab ini yaitu konsep marginal yaitu utilitas marginal, produktivitas marginal, dan biaya marginal (Jeffrey S. Royer dalam Nurhayat Indra, 2023) serta pemikiran klasik. Marshall menjelaskan bahwa, terbentuknya nilai barang dan jasa terbentuk dari dua kekuatan yakni permintaan dan penawaran, ibarat bekerjanya dua mata gunting. Dengan demikian analisis biaya produksi merupakan pendukung sisi penawaran dan teori utilitas atau kepuasan marginal sebagai inti dari pembahasan teori permintaan (Disman, 2014). Lebih lanjut, Marshall menjelaskan, untuk menyederhanakan analisis keseimbangan pasar parsial, digunakan asumsi *ceteris paribus*, sedangkan untuk memperhitungkan dimensi waktu dalam analisisnya (analisis dinamis), maka pasar diklasifikasikan ke dalam analisis jangka pendek dan jangka Panjang.

Teori struktur pasar menjelaskan keadaan pasar, perilaku para pelaku usaha di dalam pasar, serta kinerja pasar dalam perekonomian, Ropke (1995) menyebut nya teori “*structure-conduct-performance*”. **Variabel struktur** pasar dibentuk oleh jumlah dan ukuran dari penjual dan pembeli yang dalam pasar, distribusi penjual dan pembeli, ada tidaknya rintangan masuk pasar, diversifikasi produk, serta ada tidaknya integrasi vertical. **Perilaku pelaku usaha** dapat berupa: kolusi, strategi harga, strategi produk, promosi dan periklanan, Riset dan Pengembangan, serta taktik hukum (legal). Sedangkan kinerja atau *performance* pasar dapat dievaluasi dari: output pasar (perekonomian), pertumbuhan output, pengembangan teknologi, penyediaan lapangan pekerjaan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kesejahteraan dan pemerataan pendapatan.

Struktur pasar umumnya dibedakan menjadi dua pengelompokan besar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi tiga macam, yaitu: pasar persaingan monopolistic, pasar oligopoly (oligopsony pasar dengan beberapa pembeli, dan pasar monopoli (monopsoni untuk penjual tunggal), Revida dan Septarini (2017), Hendar dan Kusnadi (2010).

Pasar persaingan sempurna dimodelkan memiliki karakteristik banyaknya produsen/penjual dan pembeli dengan ukuran kecil dan terdistribusi merata di pasar

sehingga secara perorangan tidak memiliki kekuatan harga jual di pasar, barang homogen, tidak ada rintangan keluar masuk pasar, serta tidak ada campur tangan pemerintah. Perilaku usaha terbatas pada strategi harga. Tidak ada strategi produk (diversifikasi produk, karena produk homogen), tidak ada kolusi (persekongkolan) serta pemanfaatan taktik hukum seperti hak paten, merek dagang, konsesi dan lain sebagainya. Struktur pasar ini mendorong terjadinya persaingan yang sehat diantara para pelaku ekonomi yang diyakini akan menciptakan kinerja pasar yang efektif, efisiensi dalam penggunaan sumber daya ekonomi, full employment dan adanya pemerataan.

Struktur pasar atau industry persaingan monopolistic, adalah struktur pasar yang terdiri dari perusahaan yang kurang lebih sama besarnya (UMKM) yang menghasilkan produk dan jasa yang mirip dengan sedikit diferensiasi produk. Setiap perusahaan mempunyai kekuatan menentukan harga dan jumlah produknya sendiri-sendiri, karena mempunyai pelanggan sendiri, dan juga selalu berusaha untuk mencapai keuntungan yang besar (super normal profit). Subiako Tjakrawerdaja, dkk (2017).

Struktur pasar atau industri oligopolistic (atau oligopsony untuk kasus beberapa pembeli besar); suatu pasar atau industry yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar sementara konsumen pembelinya banyak. Perusahaan besar dalam industry oligopoly akan menentukan harga dan jumlah produksi (market leader) sedangkan perusahaan lain yang bukan *market leader* berperilaku sebagai *follower*. Perusahaan dalam pasar ini juga berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang besar. Subiako Tjakrawerdaja, dkk (2017). Jika tidak diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah perilaku yang biasa dilakukan oleh perusahaan oligopoly adalah melakukan kolusi harga dan produksi yang cenderung akan merugikan konsumen.

Struktur pasar monopoli, yaitu pasar atau industry yang dikuasai oleh satu perusahaan saja yang akan menentukan dan mengendalikan harga dan produksi di pasar. Menurut teori ekonomi konvensional neo klasik, perusahaan monopoli selalu berusaha pada posisi keuntungan super normal dari eksploitasi harga kepada konsumen. Subiako Tjakrawerdaja, dkk (2017).

Teori struktur pasar ini dapat menjelaskan fenomena pembentukan harga dalam industry kelapa sawit di Indonesia. Disektor hulu (kebun), para petani penghasil tandan buah sawit segar (TBS) jumlahnya jutaan orang, sementara pembeli dan pengolah TBS menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) hanya beberapa perusahaan besar saja. Oleh karena itu pasar TBS sawit Indonesia adalah pasar oligopsony. tidak dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah sebagai regulator, perusahaan besar sebagai pembeli TBS akan membeli TBS dari petani dengan harga yang rendah untuk memperoleh keuntungan super normal (keuntungan besar).

Di sector industry hilir, pabrik pengolah CPO baik untuk ekspor maupun diolah menjadi minyak goreng, juga masuk dalam industry oligopoly. Dalam beberapa waktu lalu, disinyalir adanya kolusi, spekulasi penimbunan telah berdampak pada kelangkaan minyak goreng di pasar dan harganya naik cukup tinggi. Dalam kondisi pasar demikian, naiknya harga minyak goreng di tingkat konsumen tidak mengalir kepada petani sawit penghasil TBS. Dalam jangka Panjang, apabila kelembagaan petani sawit baik asosiasi maupun koperasi tidak memiliki posisi dan kekuatan tawar menawar

(*bargaining position*) akan berdampak pada keberlanjutan industry sawit Indonesia. Petani selalu berada pada pihak yang lemah, harga TBS rendah dan petani sawit tidak bergairah untuk melakukan *replanting*. Oleh karena itu gagasan pembentukan LP4 untuk memperbaiki struktur pasar yang belum berkeadilan menjadi sangat mendesak.

1. Struktur Pasar TBS Petani dan Disparitas Harga

Di sector hulu (kebun), TBS sawit petani diproduksi oleh sekitar 10 juta orang anggota keluarga petani sawit (Apkasindo, 2023), sedangkan pembeli yang merupakan pabrik-pabrik pengolah TBS menjadi CPO adalah perusahaan besar swasta dan BUMN yang jumlahnya sedikit. Dengan karakteristik ini, maka struktur pasar TBS adalah oligopsony. Untuk memperoleh keuntungan yang besar (super normal profit), biasanya perusahaan pengolah ini akan menekan pembelian harga TBS dari petani. Untuk menjelaskan fenomena ini, penulis meminjam model analisis kurva koperasi pemasaran (*marketing cooperative*) dalam pasar persaingan tidak sempurna neo klasik Jeffrey S Royer dalam Nurhayat Indra (2023) yang diilustrasikan pada gambar berikut.

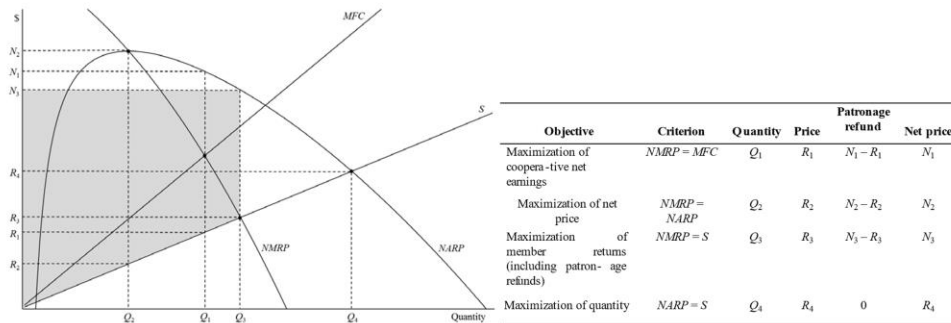


Figure 4. Price and output solutions for a marketing cooperative under various objectives

Gambar: 1. Pilihan Kebijakan Harga dan Output Perusahaan Oligopsony

Untuk memahami kurva diatas, beberapa notasi yang perlu diketahui, MFC adalah (*Marginal Factor Cost*) biaya marginal penambahan input (TBS) untuk diolah menjadi CPO, S adalah kurva penawaran TBS, NMRP (*net marginal revenue*) atau penerimaan marginal bersih dari setiap unit CPO yang dijual, NARP (*net average revenue*) atau rata-rata penerimaan bersih dari setiap unit CPO yang dijual ke pasar, R adalah harga bahan baku TBS per unit, N adalah harga jual CPO per unit, dan Q adalah jumlah TBS dan CPO yang ditransaksikan. Asumsi lain yang harus dipahami, perusahaan oligopsony dapat berbentuk perusahaan besar swasta atau koperasi, dan setiap 1 unit TBS yang diolah akan menghasilkan 1 unit yang sama menjadi CPO. Jadi apabila 1 kg TBS dengan rendemen CPO 15 %, maka 1 unit CPO juga adalah 150gram (0,15 x 1000gram TBS).

Perilaku perusahaan oligopsony untuk dapat memaksimalkan keuntungannya, biasanya akan membeli harga TBS sebesar R1 dengan volume Q1, sementara akan menjual CPO ke pasar dengan harga N1. Ditambah lagi posisi tawar petani TBS lemah, karena sifat dari komoditi TBS yang cepat rusak (*ferishable*) dan bervolume besar (*volumenous*) memaksa petani untuk segera menjualnya meskipun harganya kurang menguntungkan. Lain halnya jika perusahaan oligopsony ini adalah koperasi yang masih memiliki pilihan kebijakan harga lain untuk memberikan harga yang menguntungkan petani anggota. Misalnya jika koperasi ingin memberikan harga TBS yang tinggi bagi anggota maka, koperasi dapat membeli pada harga R3 dan volume pembelian TBS Q3. Dengan kebijakan ini sudah barang tentu keuntungan koperasi menjadi berkurang. Kebijakan harga TBS seperti ini yang diharapkan petani sawit yang saling menguntungkan (*win-win strategy*).

Struktur pasar TBS produksi perkebunan besar swasta dan BUMN tidak demikian adanya. Perusahaan perkebunan besar biasanya memiliki pabrik CPO sendiri dan juga pabrik downstream pengolahan CPO menjadi aneka produk turunannya. Artinya mereka merupakan perusahaan-perusahaan *hoding company* yang melakukan integrasi vertical hulu-hilir. Sehingga penentuan harga TBS menjadi tidak ada masalah karena sebagai bahan baku untuk pabrik-pabrik pengolahan sawit mereka (factor ketidak pastian) usaha dapat dikurangi.

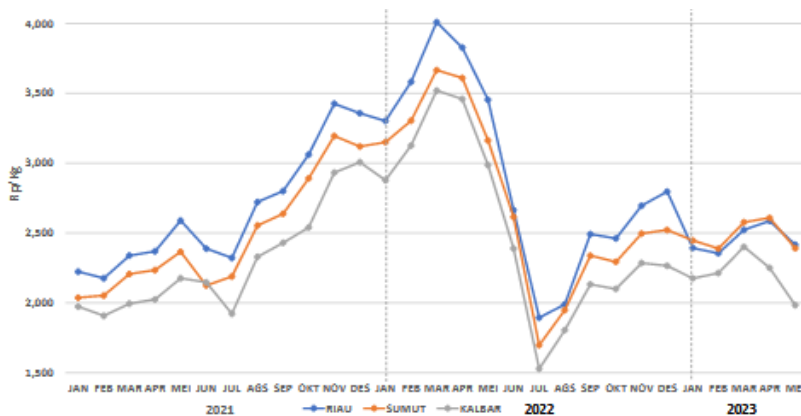
Untuk mengurangi efek eksploitasi oligopsony terhadap petani sawit, pemerintah sebenarnya telah memiliki kebijakan penetapan acuan harga sawit petani yang menjadi acuan petani dan para perusahaan pengolah TBS, melalui Permentan No.01 Tahun 2018 Tentang Pedoman Harga Pembelian Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan. Yang bertanggung jawab untuk mengawasi penetapan harga menurut Permentan ini adalah Gubernur yang provinsinya memiliki perkebunan kelapa sawit dan hasil pengawasannya dilaporkan setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan. Selain itu, kebijakan pemerintah tentang penetapan harga TBS di tingkat provinsi, dan penerapan harga TBS di tingkat petani, harga CPO KBN, bea keluar, dan pungutan ekspor CPO diatur menurut Peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan. (lihat skema pada gambar 2)



Sumber: Apkasindo, 2023.

Gambar 2. Skema Kebijakan Penentuan Harga TBS Petani

Dari sekema di atas, tergambar bahwa penetapan harga TBS, CPO, Bea keluar, dan pungutan ekspor memang agak kompleks. Terutama jika kita mencermati formula penetapan harga TBS yang diatur melalui Permentan No 01 tersebut. Tetapi dapat dipahami, bahwa tujuan dari kebijakan tersebut sejatinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Tabel 2.. berikut adalah data hasil penetapan harga Tim harga Provinsi. Dari grafik tersebut, harga TBS di 3 Provinsi Sentra produksi Sawit Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat terdapat disparitas harga. Begitupun juga terjadi fluktuasi yang tajam dari bulan ke bulan dalam periode Januari 2021 hingga Mei 2023. Disparitas harga tidak ada masalah jika terjadi karena perbedaan biaya transportasi, perbedaan kualitas TBS dari rendemen ekstraksi minyaknya. Disparitas harga akan mencerminkan adanya ketidakadilan antar wilayah atau antar petani swadaya dan petani PIR manakala biaya transportasi dan kualitas TBS sama.



Gambar: 3 Penetapan Harga TBS Di 3 Povinsi Sentra Produksi Sawit (2021-2023)

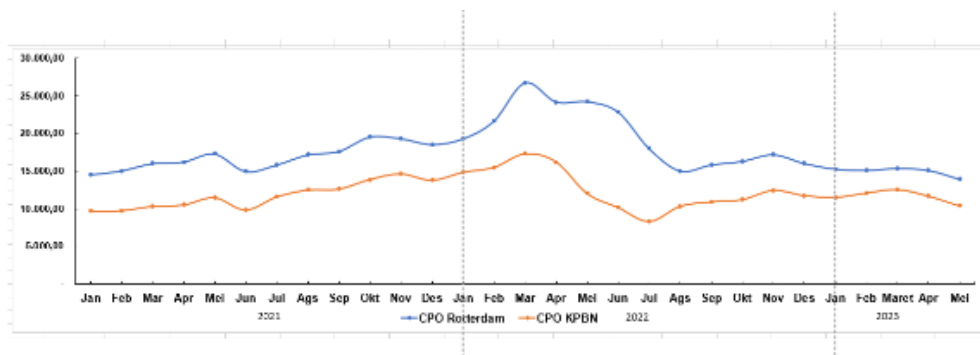
Faktor-faktor yang berpengaruh pada penetapan harga TBS di tiap Provinsi, menurut rumus penentuan harga TBS Permentan No. 01 tahun 2018, setidaknya ada lima komponen:

1. Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima petani/pekebun pada periode sebelumnya,
2. Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan local masing-masing perusahaan pengolah pada tahun berjalan.
3. Harga rata-rata minyak Palm Kernel (PKO) tertimbang realisasi realisasi penjualan ekspor (FOB) dan local masing-masing perusahaan pengolah pada periode berjalan,
4. Rendemen CPO table, dan
5. Rendemen PKO table.

Harga referensi CPO bursa komoditas sawit Indonesia dapat mengikuti tiga sumber referensi harga, yaitu:

- 1) Harga PT. KPBN, PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara Inacom didirikan pada tahun 1968 sebagai anak perusahaan dari Holding Perkebunan Nusantara yang diberikan kepercayaan dalam bidang imbal jasa Perkebunan Nusantara Kelapa Sawit (CPO, PKO, PKM).
- 2) Harga *Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX)*, adalah bursa komoditi dan derivatifnya, dimana transaksi komoditi secara fisik maupun dalam bentuk turunannya. Bursa komoditi ini didirikan untuk menyelenggarakan perdagangan komoditi di Indonesia secara multilateral dan terorganisasi di dalam bursa komoditi termasuk sawit.
- 3) Harga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI), bursa ini memberikan informasi harga-harga komoditi termasuk CPO di seluruh Indonesia mulai dari level terbawah hingga level teratas dalam siklus penjualan komoditi. Harga ini diperoleh dari setiap level penjualan yang bekerja sama dengan BAPPEPTI. Perwakilan ini untuk seterusnya disebut kontributor dan level penjualan disebut kualifikasi.

Harga referensi CPO ditingkat Internasional, dari informasi yang dapat dikumpulkan adalah harga CPO Rotterdam (Belanda), dan harga CPO Malaysia. Gambar 4 menunjukkan adanya disparitas harga CPO (FOB) antara harga referensi Rotterdam dan PT. KBN.



Gambar 4. Disparitas Harga CPO (FOB) Rotterdam dan PT. KPBN

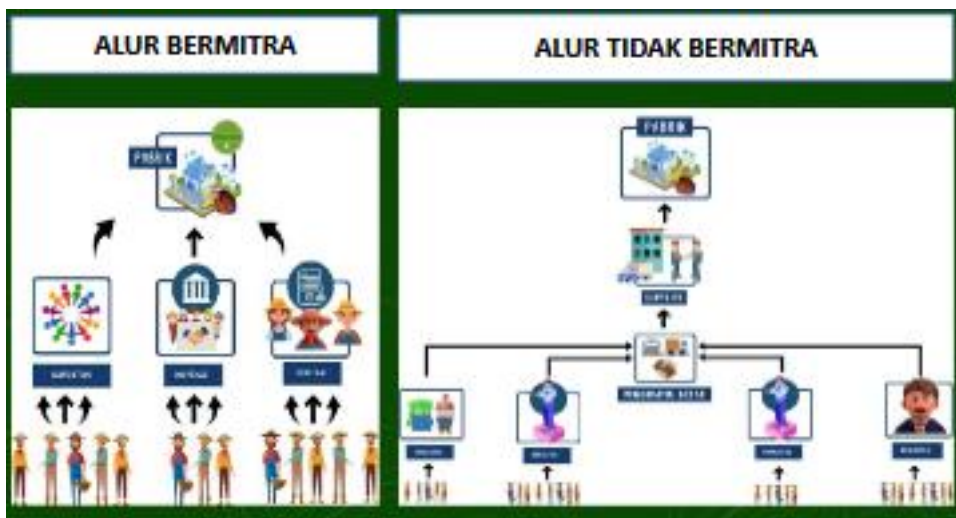
Dari grafik di atas, harga referensi CPO Rotterdam selalu lebih tinggi dari harga referensi PT. KPBN. Ini menunjukkan adanya disparitas harga. Jika yang diterapkan dalam penentuan harga TBS petani adalah harga referensi PT. KPBN maka akan menekan harga TBS di tingkat petani.

Disparitas harga juga terjadi pada harga TBS petani swadaya dengan petani bermitra (petani PIR), seperti yang tergambarkan pada grafik berikut.



Gambar 5. Disparitas Harga TBS Petani Swadaya Dengan Petani Bermitra

Dalam periode Januari 2022 hingga April 2023, harga TBS Petani Swadaya secara konsisten selalu lebih rendah dari harga TBS Petani Bermitra. Ketidakadilan harga ini salah satunya karena Petani Swadaya pada umumnya belum menjadi anggota kelembagaan petani seperti kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan/atau anggota koperasi petani sawit, sehingga kurang memiliki kekuatan tawar (bargaining position) dalam menghadapi para pedagang pengumpul (tengkulak) TBS dalam mata rantai pemasarannya (lihat gambar 5). Sementara para Petani Bermitra mereka sedikit lebih baik nasibnya karena telah berorganisasi dengan kelembagaan seperti Gapoktan dan koperasi.



Gambar 6. Rantai Pemasaran TBS Petani Swadaya dan Petani Bermitra

Terjadinya disparitas harga TBS di tingkat petani ini, memperkuat pemikiran bahwa perlu adanya Lembaga baru yaitu Lembaga Pelayanan Pemasaran Petani Pancasila (LP4) yang secara politik akan memperkuat kelembagaan petani yang ada seperti

Gapoktan, HKTI, Apkasindo, dan Koperasi Sawit yang hingga saat ini masih belum mampu untuk mengatasi masalah ketidakadilan harga.

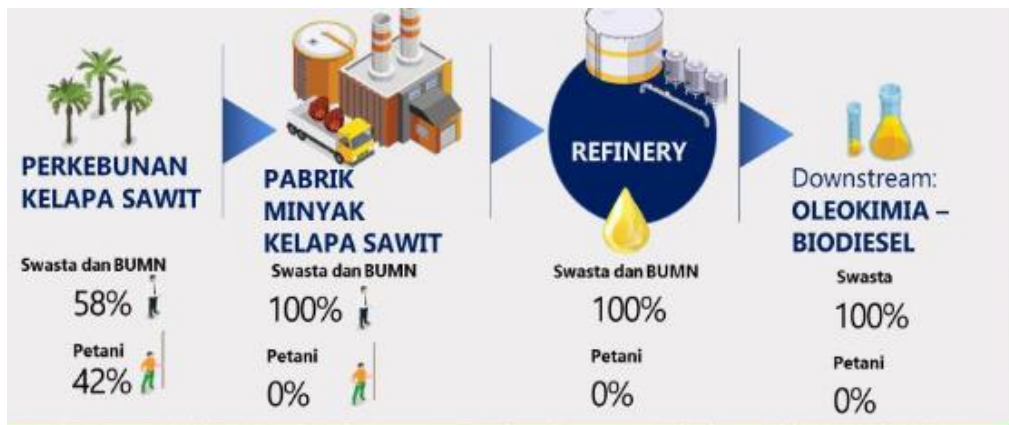
2. Holding Company dan Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal merupakan salah satu perilaku perusahaan besar yang masuk dalam industri dengan struktur pasar persaingan tidak sempurna seperti pasar oligopoly yang seringkali juga oligopsony. Perilaku ini dilakukan melalui holding company dengan melakukan strategi bisnis kearah hulu (bahan baku) maupun ke hilir (pengolahan bahan baku menjadi produk jadi hasil olahan) bahkan juga sampai ke pemasarannya. Dalam menjalankan operasi integrasi vertikal, perusahaan besar induk (holding), terdiri dari beberapa perusahaan yang masuk di industri hulu, ada perusahaan yang masuk di industri hilir dan pemasaran yang semuanya merupakan anak perusahaan induk tersebut. Dalam kasus kelapa sawit, perusahaan CPO, Perusahaan Minyak Goreng, dan Perusahaan Oleochemical lainnya, juga memiliki kebun kelapa sawit skala besar untuk keamanan pasokan bahan bakunya.

Indikasi adanya integrasi vertikal, juga dapat diamati dari rantai pasok dan rantai nilai industri kelapa sawit. Rantai pasok (*supply chain*), merupakan salah satu aspek bahasan penting dalam perspektif manajemen operasional sebuah kegiatan bisnis. Rantai pasok terdiri dari aliran semua informasi, produk, bahan, dan dana antara berbagai tahap pembuatan dan penjualan produk ke pengguna atau konsumen akhir. Fungsi-fungsi yang dapat dipelajari dari rantai pasok meliputi: mengembangkan produk, pemasaran, operasi, distribusi, informasi, keuangan, pelayanan pelanggan (Universitas Akuisisi Pertahanan, <https://translate.google.com>)

Konsep rantai nilai berasal dari perspektif manajemen bisnis perusahaan. Rantai nilai adalah proses dimana perusahaan menambahkan nilai pada bahan mentahnya untuk menghasilkan produk yang pada akhirnya dijual ke konsumen (Universitas Baker, <https://translate.google.com>). Dalam studi rantai pasok dan rantai nilai, aliran produk, informasi, dana, transformasi bahan mentah menjadi produk jadi, dan saluran distribusinya biasanya dikaitkan dengan efisiensi bisnis dan pemasaran. Perusahaan yang mampu melakukan manajemen rantai pasok dan rantai nilai yang efisien, manakala mampu menciptakan nilai produk tepat waktu, tempat, jumlah, dan kualitas sesuai dengan keinginan pasar. Efisiensi rantai pasok dan rantai nilai adalah perusahaan memperoleh penghematan biaya dalam seluruh prosesnya sehingga mampu menjual produk dengan kualitas sesuai harapan konsumen dengan harga yang kompetitif di pasar. Harga yang dibayarkan konsumen akhir secara adil akan terdistribusi kepada semua pelaku rantai pasok dan nilai sesuai dengan korbanan dalam menjalankan fungsi operasi bisnis yang dijalankan.

Dari konsep rantai pasok dan rantai nilai ini, selanjutnya dapat digunakan untuk memotret dan menganalisis kondisi empiric dari rantai pasok dan rantai nilai bisnis kelapa sawit Indonesia. Informasi mengenai hal ini disampaikan oleh Rino Friano, Apkasindo, 2023 pada gambar berikut.



Gambar 7. Rantai Pasok dan Rantai Sawit Indonesia (Hulu-Hilir)

Aliran rantai pasok bahan mentah berupa TBS berasal dari petani 42%, Perusahaan Besar Negara sekitar 5 %, dan paling dominan dari Perkebunan Besar Swasta sekitar 53%. Selanjutnya aliran produk berupa CPO (yang diolah oleh pabrik minyak kelapa sawit Swasta dan BUMN), ke industry *Refinery* milik Swasta dan BUMN, serta ke industry *downstream* Oleokimia dan Biodiesel, 100 % milik swasta. Aliran informasi seperti ini menjadi asimetri untuk petani, karena setelah TBS diolah menjadi CPO, kemudian CPO Sebagian diekspor ke luar negeri dan Sebagian lagi di olah di dalam negeri (hilirisasi) memerlukan proses (rantai nilai) yang kompleks, dan petani tidak memiliki akses dan control, karena 100% kegiatan pengolahan dari TBS menjadi CPO dan turunnanya Sebagian besar milik perusahaan besar swasta yang menerapkan strategi integrasi vertikal melalui *holding company* dan hanya sebagian BUMN. Dalam kondisi ini nilai tambah dari proses hilirisasi yang merupakan margin terbesar dari rantai nilai dinikmati oleh perusahaan besar. Nilai tambah ini dapat dipastikan sedikit sekali yang mengalir ke petani

Penutup

Struktur pasar TBS yang dihadapi petani dalam industri kelapa sawit di Indonesia adalah struktur pasar persaingan oligopsony (dominasi pembeli oleh beberapa perusahaan besar), sedangkan di satu sisi pasar CPO masuk dalam pasar persaingan oligopoly. Pada struktur pasar seperti ini petani sawit cenderung berada pada posisi tawar yang lemah. Perilaku perusahaan besar melakukan strategi integrasi vertikal hulu-hilir yang efisien dan biasanya menguntungkan anak-anak perusahaannya dalam satu kesatuan manajemen perusahaan induknya (*holding company*).

Oleh karena itu dalam jangka pendek, petani melalui kelembagaannya seperti koperasi diharapkan mampu meningkatkan kekuatan tawarnya (*bargaining position*) untuk melakukan win-win solution dengan perusahaan besar pembeli TBS sebagai bahan baku CPO agar nilai tambah dari hasil pengolahan TBS juga dapat memberikan insentif harga yang lebih baik bagi para petani. Dalam jangka menengah panjang, koperasi petani sawit dapat memiliki saham pada industry pengolah TBS dan/atau membangun pabrik pengolahan sendiri untuk memperbaiki posisi tawarnya di pasar.

Bibliografi

- Disman. 2014. Sejarah Teori Teori Ekonomi: Perkembangan Pemikiran Ekonomi dan Kontroversi. Resipotory Universitas Terbuka. Jakarta.
- Jeffrey S.Royer. 2014. *The Neoclassical Theory of Cooperatives: Part I*. Journal Of Cooperative. Volume 28.
- Jeffrey S.Royer. 2014. *The Neoclassical Theory of Cooperatives: Part II*. Journal Of Cooperative. Volume 28.
- Jochen Ropke. 1995). *The Economic Theory Of Cooperative: special case of Indonesia*, (diterjemahkan oleh Srijatnika, FE Unpad).
- Nurhayat Indra. 2023. Kebijakan Harga Koperasi dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Anggota, Book Chapter, Resipotory Ikopin.
- Rino Afriano. 2023. Fluktuasi Harga CPO dan Hubungannya Ke TBS Petani. Materi Kuliah Umum Politeknik Sawit CWE, 05 Juni 2023.
- Subijakto Tjakrawerdya dkk. 2017. Sistem Ekonomi Pancasila. Edisi 1 Cetakan kedua. Rajawali Press. Depok.
- Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2021. Statisti Perkebunan Unggulan 2019-2020. Diterbitkan Oleh Sekretariat Jenderal Perkebunan. Jakarta.

<https://translate.google.com>

